



Pengembangan Model Kepemimpinan Publik Etis Berbasis Islam untuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berkelanjutan

Andi Mulyadi^{1*}, Jamaluddin Ahmad¹, Muliani S¹, Muhammad Rais Rahmat Razak¹, Nurjannah Nonci¹, Erfina¹

¹Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i4.3136>

Article Info

Received: August, 10th 2026

Revised: August, 30th 2026

Accepted: September, 10th 2026

Correspondence:

adhimulyadippos@gmail.com

Phone: +628

Abstract: Public governance increasingly faces complex challenges, including corruption, declining public trust, weak bureaucratic integrity, and growing demands for transparent, accountable, and sustainable governance. These conditions highlight the need for a leadership model grounded not only in organizational effectiveness but also in strong ethical foundations. This study develops a conceptual framework of Islamic Ethical Public Leadership (IEPL) and examines its contribution to sustainable local governance. Using a qualitative conceptual approach, the study employs a systematic literature review and theoretical synthesis of public leadership ethics, transformational leadership, servant leadership, Islamic leadership values, and sustainable governance. Qualitative content analysis is used to identify conceptual relationships and formulate an integrated leadership model. The findings indicate that Islamic leadership values, particularly al-amānah (trustworthiness), al-'adl (justice), al-ṣidq (honesty), shūrā (consultation), and maṣlahah (public interest), provide a strong normative foundation for ethical public leadership. Their integration with public leadership ethics, transformational leadership, and servant leadership forms the IEPL model, which can strengthen governance integrity, public trust, institutional resilience, and sustainable local governance. This study contributes to public administration literature by proposing an integrative conceptual model and provides practical guidance for bureaucratic reform and public leadership development.

Keywords: Islamic Ethical Public Leadership; Public Leadership Ethics; Transformational Leadership; Servant Leadership; Islamic Leadership Values; Sustainable Governance; Local Governance.

Citation: Mulyadi, A., Ahmad, J., Muliani, M., Razak, M. R. R., Nonci, N., & Erfina, E. (2026). Pengembangan Model Kepemimpinan Publik Etis Berbasis Islam untuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(4), 5230-5238. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i4.3136>

Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan publik kontemporer menghadapi tantangan yang semakin kompleks terkait etika birokrasi, menurunnya kepercayaan publik, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta

meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola yang transparan dan berkelanjutan. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, tetapi juga menunjukkan

Email: adhimulyadippos@gmail.com

kepemimpinan yang etis guna menjamin akuntabilitas, integritas, dan legitimasi publik. Kegagalan etika dalam institusi publik telah menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan, terutama dalam sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan kewenangan besar kepada pemimpin daerah dalam proses perumusan kebijakan dan administrasi publik.

Dalam kajian administrasi publik, kepemimpinan diakui sebagai faktor penting yang menentukan efektivitas organisasi, kualitas tata kelola, dan tingkat kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan transformasional dikenal karena kemampuannya dalam mendorong perubahan organisasi, inovasi, dan peningkatan kinerja kelembagaan. Sementara itu, kepemimpinan pelayan (*servant leadership*) menekankan orientasi pelayanan, empati, tanggung jawab moral, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut semakin relevan dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern, termasuk transformasi digital, perubahan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun demikian, berbagai kegagalan tata kelola masih terjadi akibat lemahnya fondasi etika dalam kepemimpinan publik. Efektivitas kepemimpinan tanpa komitmen etis berpotensi menimbulkan perilaku oportunistik, lemahnya akuntabilitas, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan etika kepemimpinan publik menjadi agenda penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Prinsip-prinsip kepemimpinan Islam seperti keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), kejujuran (*al-ṣidq*), musyawarah (*shūrā*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), dan kemaslahatan publik (*maslahah*) memberikan landasan normatif bagi tata kelola yang etis. Nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip tata kelola modern, seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, dan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji kepemimpinan transformasional, kepemimpinan pelayan, dan kepemimpinan etis dalam organisasi publik. Deng et al. (2023) menekankan kontribusi kepemimpinan transformasional terhadap efektivitas organisasi dan kapasitas kelembagaan. Monica dan Partina (2024) menunjukkan pengaruh positif kepemimpinan pelayan terhadap keterlibatan pegawai dan kinerja pelayanan publik. Sementara itu, Bektı et al. (2024) mengkaji integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik kepemimpinan publik. Namun demikian, masih

terdapat tiga kesenjangan utama dalam literatur. Pertama, terdapat *kesenjangan konseptual (conceptual gap)* karena penelitian sebelumnya umumnya mengkaji kepemimpinan transformasional, kepemimpinan pelayan, dan kepemimpinan Islam secara terpisah, tanpa mengintegrasikannya ke dalam kerangka etika kepemimpinan publik yang komprehensif. Kedua, terdapat *kesenjangan teoretis (theoretical gap)* karena sebagian besar penelitian lebih berfokus pada efektivitas organisasi, kinerja pegawai, dan perilaku kepemimpinan, sementara aspek tata kelola etis (*ethical governance*) dan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan (*sustainable regional governance*) masih memperoleh perhatian yang terbatas. Ketiga, terdapat *kesenjangan kontekstual (contextual gap)* karena studi mengenai etika kepemimpinan publik berbasis nilai-nilai Islam dalam konteks pemerintahan daerah dan tantangan administrasi publik kontemporer masih relatif sedikit, khususnya di negara-negara berkembang.

Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual baru melalui pengembangan *konsep Islamic Ethical Public Leadership*, yaitu kerangka kepemimpinan yang mengintegrasikan:

- Etika Kepemimpinan Publik (*Public Leadership Ethics*);
- Kepemimpinan Transformasional (*Transformational Leadership*);
- Kepemimpinan Pelayan (*Servant Leadership*);
- Nilai-Nilai Etika Islam (*Islamic Ethical Values*);
- Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berkelanjutan (*Sustainable Regional Governance*).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada efektivitas kepemimpinan, kerangka ini menempatkan tata kelola etis sebagai fondasi utama kepemimpinan publik. Model yang diusulkan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dapat memperkuat integritas, transparansi, kepercayaan publik, ketahanan tata kelola, dan keberlanjutan pemerintahan daerah.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka *konseptual Islamic Ethical Public Leadership* serta menganalisis bagaimana integrasi etika kepemimpinan publik, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan pelayan, dan nilai-nilai Islam dapat berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola etis, administrasi publik Islam, dan kepemimpinan publik berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi reformasi tata kelola pemerintahan daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif konseptual (*qualitative conceptual research*) yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka teoritis *Islamic Ethical Public Leadership* dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan (*sustainable regional governance*). Penelitian konseptual dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah pengembangan teori dan integrasi konsep, bukan pengujian empiris.

Penelitian berupaya mensintesis berbagai perspektif teoritis mengenai etika kepemimpinan publik, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan pelayan, nilai-nilai kepemimpinan Islam, dan tata kelola berkelanjutan guna membangun model kepemimpinan yang komprehensif dan relevan dengan tantangan administrasi publik kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif untuk mengkaji hubungan antar konsep utama dan menghasilkan kerangka konseptual baru yang mampu menjelaskan bagaimana kepemimpinan berbasis etika dan nilai-nilai Islam dapat berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus penelitian terletak pada eksplorasi teoritis, sintesis konseptual, dan pengembangan model, bukan pada pengujian hipotesis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan publikasi akademik. Sumber data meliputi artikel jurnal bereputasi, buku akademik, prosiding konferensi, laporan kebijakan, serta berbagai publikasi yang membahas kepemimpinan, etika, administrasi publik, tata kelola Islam, dan keberlanjutan. Literatur dikumpulkan melalui beberapa basis data akademik internasional, antara lain:

- Scopus
- ScienceDirect
- SpringerLink
- Taylor & Francis Online
- Google Scholar

Untuk menjamin relevansi dan kualitas sumber yang digunakan, penelitian ini menerapkan beberapa kriteria inklusi, yaitu:

1. Publikasi yang membahas etika kepemimpinan publik, tata kelola etis, atau administrasi publik.
2. Penelitian yang mengkaji kepemimpinan transformasional atau kepemimpinan pelayan.
3. Literatur yang membahas nilai-nilai kepemimpinan Islam dan tata kelola pemerintahan.
4. Publikasi yang berkaitan dengan tata kelola berkelanjutan atau tata kelola pemerintahan daerah.
5. Sumber akademik yang telah melalui proses *peer review* dan dipublikasikan terutama pada periode 2015-2025.

Melalui kriteria tersebut, penelitian memprioritaskan literatur mutakhir tanpa mengabaikan

teori-teori klasik yang menjadi dasar pengembangan kerangka konseptual.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses *systematic literature review* yang terdiri atas empat tahapan utama.

Identifikasi (*Identification*)

Literatur yang relevan diidentifikasi menggunakan beberapa kata kunci utama, yaitu:

- *Public Leadership Ethics*
- *Ethical Governance*
- *Transformational Leadership*
- *Servant Leadership*
- *Islamic Leadership*
- *Islamic Governance*
- *Sustainable Governance*
- *Regional Governance*

Penyaringan (*Screening*)

Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan judul, abstrak, dan relevansinya terhadap tujuan penelitian. Publikasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan konsep etika kepemimpinan dan keberlanjutan tata kelola dikeluarkan dari proses analisis.

Klasifikasi (*Classification*)

Literatur yang terpilih dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu:

- Etika Kepemimpinan Publik
- Kepemimpinan Transformasional
- Kepemimpinan Pelayan
- Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam
- Tata Kelola Berkelanjutan

Sintesis (*Synthesis*)

Tahap terakhir dilakukan dengan mensintesis berbagai konsep, mengidentifikasi hubungan teoritis antar variabel, serta mengintegrasikan temuan-temuan literatur untuk membangun model *Islamic Ethical Public Leadership* yang diusulkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik *qualitative content analysis* dengan pendekatan interpretatif. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, tema-tema yang berulang, hubungan teoritis, serta implikasi tata kelola yang muncul dari berbagai literatur yang dianalisis. Proses analisis data dilakukan melalui empat tahapan.

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, konsep-konsep dan argumentasi teoritis yang relevan diekstraksi dari literatur yang telah dipilih, sedangkan informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian dieliminasi.

Kategorisasi Tematik (*Thematic Categorization*)

Konsep-konsep yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan ke dalam lima dimensi utama penelitian, yaitu:

- Etika Kepemimpinan Publik
- Kepemimpinan Transformasional
- Kepemimpinan Pelayan
- Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam
- Tata Kelola Berkelanjutan

Interpretasi Konseptual (*Conceptual Interpretation*)

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi titik temu dan hubungan saling melengkapi antar konsep. Perhatian khusus diberikan pada peran nilai-nilai etika Islam dalam memperkuat praktik kepemimpinan publik modern.

Sintesis Teoretis (*Theoretical Synthesis*)

Tahap akhir dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh konsep ke dalam kerangka terpadu yang disebut *Islamic Ethical Public Leadership (IEPL)*. Kerangka ini menjelaskan bagaimana etika kepemimpinan, kapasitas transformasional, orientasi pelayanan, dan nilai-nilai Islam secara bersama-sama berkontribusi terhadap integritas tata kelola, kepercayaan publik, ketahanan pemerintahan, dan tata kelola daerah yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan ketelitian konseptual, penelitian ini menggunakan sumber-sumber akademik yang kredibel dan telah melalui proses *peer review*. Selain itu, penelitian menerapkan prosedur yang sistematis dalam proses seleksi, kategorisasi, dan sintesis literatur. Triangulasi perspektif teoritis dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai bidang kajian, seperti studi kepemimpinan, administrasi publik, tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, reliabilitas, dan validitas teoritis dari kerangka konseptual yang dikembangkan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model konseptual yang kuat serta memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian empiris selanjutnya mengenai *Islamic Ethical Public Leadership* dan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Islamic Ethical Public Leadership sebagai Fondasi Integritas Tata Kelola

Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai etika Islam ke dalam etika kepemimpinan publik memberikan fondasi yang kuat

bagi penguatan integritas tata kelola pemerintahan. Berbagai tantangan tata kelola kontemporer seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, inefisiensi birokrasi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat menunjukkan bahwa reformasi administrasi semata tidak cukup tanpa adanya kepemimpinan yang berlandaskan etika.

Kerangka *Islamic Ethical Public Leadership* yang diusulkan menempatkan prinsip *al-amānah* (amanah), *al-'adl* (keadilan), dan *al-sidq* (kejujuran) sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut mendorong pemimpin publik untuk menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab, menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan, serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dari perspektif tata kelola, integritas tidak hanya dipahami sebagai karakter individu, tetapi juga sebagai nilai kelembagaan yang membentuk perilaku organisasi. Pemimpin yang secara konsisten menunjukkan perilaku etis berkontribusi terhadap terciptanya sistem administrasi yang transparan, institusi yang akuntabel, dan implementasi kebijakan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kepemimpinan etis menjadi instrumen strategis dalam mengurangi risiko tata kelola serta memperkuat legitimasi kelembagaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika Islam melengkapi konsep etika kepemimpinan publik modern dengan menghadirkan dimensi akuntabilitas moral dan spiritual. Jika tata kelola modern lebih menekankan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan institusi, maka kepemimpinan Islam memperluas makna akuntabilitas hingga mencakup pertanggungjawaban kepada Tuhan. Akuntabilitas ganda ini memperkuat integritas tata kelola dan mendukung terwujudnya administrasi publik yang berkelanjutan.

Integrasi Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Pelayan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kerangka konseptual penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan pelayan merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam mewujudkan kepemimpinan publik yang efektif. Kepemimpinan transformasional berkontribusi melalui visi organisasi, inovasi, dan kemampuan melakukan perubahan strategis, sedangkan kepemimpinan pelayan memperkuat orientasi pelayanan publik, tanggung jawab sosial, dan keterlibatan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kepemimpinan transformasional memungkinkan

pemimpin untuk merespons berbagai tantangan seperti reformasi birokrasi, transformasi digital, dan modernisasi kelembagaan. Organisasi publik saat ini membutuhkan pemimpin yang mampu mendorong inovasi serta menyesuaikan sistem pemerintahan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional memainkan peran penting dalam membangun tata kelola yang responsif dan berorientasi masa depan.

Namun demikian, kepemimpinan transformasional yang terlalu berorientasi pada kinerja dan perubahan organisasi berpotensi mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat. Kelemahan tersebut dapat diimbangi melalui kepemimpinan pelayanan yang menekankan empati, pelayanan, pengabdian, dan pengembangan komunitas. Kepemimpinan pelayanan memastikan bahwa reformasi tata kelola tetap berpusat pada masyarakat, bukan semata-mata pada efisiensi administratif.

Integrasi kedua pendekatan tersebut menghasilkan model kepemimpinan yang seimbang antara efektivitas kelembagaan dan penciptaan nilai publik. Dalam kerangka *Islamic Ethical Public Leadership*, kepemimpinan transformasional berfungsi sebagai penggerak inovasi tata kelola, sedangkan kepemimpinan pelayanan memastikan bahwa inovasi tersebut tetap inklusif, etis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Islamic Ethical Public Leadership dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan salah satu indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan. Analisis konseptual dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Ethical Public Leadership* memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsivitas institusi pemerintah.

Kepercayaan publik terbentuk ketika masyarakat meyakini bahwa pemimpin bertindak secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip etika dan mengutamakan kepentingan umum. Praktik kepemimpinan yang ditandai oleh kejujuran, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab akan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap institusi pemerintahan serta memperkuat dukungan terhadap kebijakan publik.

Prinsip *shūrā* (musyawarah) dan *maslahah* (kemaslahatan publik) memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks ini. Musyawarah mendorong tata kelola partisipatif melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan kemaslahatan publik memastikan bahwa setiap

kebijakan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan pada kepentingan politik jangka pendek.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui efektivitas pelayanan, tetapi juga melalui perilaku etis pemimpin. Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan pemimpin, semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, masyarakat akan lebih bersedia berpartisipasi dalam proses pemerintahan, mendukung kebijakan pembangunan, dan bekerja sama dengan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.

Ketahanan Tata Kelola dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berkelanjutan

Temuan penting lainnya dari penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara *Islamic Ethical Public Leadership* dan ketahanan tata kelola (*governance resilience*). Ketahanan tata kelola mengacu pada kemampuan institusi publik untuk beradaptasi, merespons, dan pulih dari berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan.

Pemerintah daerah saat ini menghadapi lingkungan yang semakin dinamis dan tidak pasti akibat disrupsi teknologi, volatilitas ekonomi, perubahan sosial, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam kondisi tersebut, tata kelola yang tangguh membutuhkan tidak hanya kapasitas kelembagaan yang kuat, tetapi juga kepemimpinan etis yang mampu menjaga legitimasi publik dan kohesi sosial.

Kerangka yang diusulkan menunjukkan bahwa kepemimpinan etis berkontribusi terhadap ketahanan tata kelola melalui tiga mekanisme utama. Pertama, integritas tata kelola mengurangi kerentanan institusi dengan meminimalkan praktik korupsi dan memperkuat sistem akuntabilitas. Kedua, kepercayaan publik meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian. Ketiga, kepemimpinan yang berorientasi pelayanan memperkuat partisipasi masyarakat dan kemampuan kolektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik.

Nilai-nilai kepemimpinan Islam semakin memperkuat ketahanan tersebut melalui penekanan pada keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan publik. Nilai-nilai ini mendorong pemimpin untuk mengadopsi perspektif jangka panjang dan mengutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan dibandingkan kepentingan politik sesaat. Sebagai hasilnya, *Islamic Ethical Public Leadership* mendukung terbentuknya sistem pemerintahan yang

adaptif, responsif, dan mampu mempertahankan legitimasi publik dalam jangka panjang.

Model Islamic Ethical Public Leadership yang Diusulkan

Berdasarkan hasil sintesis konseptual yang dilakukan, penelitian ini mengusulkan *Islamic Ethical Public Leadership* (IEPL) sebagai kerangka tata kelola yang komprehensif yang mengintegrasikan kepemimpinan etis, transformasi organisasi, orientasi pelayanan publik, dan nilai-nilai moral Islam.

Model yang dikembangkan menempatkan Etika Kepemimpinan Publik sebagai fondasi normatif utama yang diperkuat oleh Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam sebagai sumber legitimasi moral dan etika. Dalam model ini, kepemimpinan transformasional berfungsi sebagai penggerak perubahan strategis, inovasi, dan pengembangan kapasitas organisasi, sedangkan kepemimpinan pelayan memastikan bahwa seluruh proses tata kelola tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan publik. Interaksi antara keempat dimensi tersebut menghasilkan empat luaran utama tata kelola, yaitu:

1. Integritas Tata Kelola (*Governance Integrity*)
2. Kepercayaan Publik (*Public Trust*)
3. Ketahanan Tata Kelola (*Governance Resilience*)
4. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berkelanjutan (*Sustainable Regional Governance*)

Model ini memperluas teori-teori kepemimpinan sebelumnya dengan memasukkan dimensi etika dan spiritual ke dalam diskursus tata kelola pemerintahan. Berbeda dengan model kepemimpinan konvensional yang lebih berfokus pada efektivitas organisasi, *Islamic Ethical Public Leadership* menempatkan integritas, akuntabilitas, kemaslahatan publik, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama kepemimpinan publik. Kontribusi konseptual ini memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana kepemimpinan berbasis nilai dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan administrasi publik modern.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan literatur tata kelola etis (*ethical governance*) dengan menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan efektivitas administrasi dan inovasi teknologi. Tata kelola yang berkualitas memerlukan kepemimpinan yang mampu menjaga integritas, memperkuat legitimasi kelembagaan, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan akuntabilitas publik.

Penelitian ini juga memperluas teori Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Pelayan melalui integrasi nilai-nilai etika Islam dalam konteks tata kelola pemerintahan. Integrasi tersebut menghasilkan pendekatan yang lebih holistik karena menggabungkan kinerja organisasi, tanggung jawab etis, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan tata kelola dalam satu kerangka konseptual yang terpadu.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini memperkaya literatur administrasi publik dengan menghadirkan model konseptual baru yang menghubungkan etika kepemimpinan, nilai-nilai Islam, dan tata kelola berkelanjutan. Model ini menawarkan pendekatan multidimensional yang mampu menjelaskan hubungan antara perilaku kepemimpinan, kualitas tata kelola, dan keberhasilan pembangunan daerah.

Dari perspektif praktis, kerangka *Islamic Ethical Public Leadership* dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan program pelatihan kepemimpinan, reformasi birokrasi, penguatan integritas aparatur sipil negara, serta penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan. Model ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam membangun budaya organisasi yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Lebih lanjut, konsep *Islamic Ethical Public Leadership* memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan tata kelola kontemporer, termasuk transformasi digital pemerintahan, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Oleh karena itu, model ini berpotensi menjadi salah satu pendekatan alternatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, resilien, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara etika kepemimpinan publik, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan pelayan, dan nilai-nilai Islam mampu menghasilkan kerangka kepemimpinan yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan kepemimpinan yang dikembangkan secara parsial. Dengan demikian, *Islamic Ethical Public Leadership* dapat dipandang sebagai model kepemimpinan publik yang relevan untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan abad ke-21.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan publik dan reformasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya memperkuat kepemimpinan yang beretika dan

mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Kerangka *Islamic Ethical Public Leadership* yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak dapat dicapai hanya melalui efisiensi administrasi, inovasi teknologi, atau restrukturisasi kelembagaan semata. Sebaliknya, tata kelola yang berkelanjutan memerlukan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.

Pertama, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola berbasis integritas dalam institusi pemerintahan daerah. Pemerintah perlu menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab ke dalam budaya organisasi, proses pengambilan keputusan, serta sistem pelayanan publik. Penguatan kode etik aparatur, transparansi pengelolaan anggaran, mekanisme pengawasan yang efektif, dan sistem akuntabilitas publik yang kuat menjadi langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai individual pemimpin, tetapi juga menjadi karakter kelembagaan yang menopang kualitas tata kelola pemerintahan.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan perlunya pengembangan program penguatan kepemimpinan etis dalam sektor publik. Selama ini, program pengembangan kepemimpinan birokrasi lebih banyak berfokus pada aspek manajerial dan teknis. Padahal, tantangan tata kelola modern menuntut pemimpin yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga memiliki kapasitas moral dan etika yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan kepemimpinan bagi aparatur sipil negara perlu mengintegrasikan materi mengenai etika pemerintahan, integritas publik, tanggung jawab sosial, pelayanan publik, serta nilai-nilai kepemimpinan Islam yang relevan dengan prinsip tata kelola modern.

Ketiga, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan tata kelola yang berpusat pada masyarakat (*citizen-centered governance*) melalui pendekatan kepemimpinan pelayan (*servant leadership*). Pemerintah daerah perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Praktik musyawarah, konsultasi publik, dan keterlibatan pemangku kepentingan harus menjadi bagian integral dari proses tata kelola. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Keempat, model *Islamic Ethical Public Leadership* memiliki implikasi strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang

berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan kelembagaan. Kepemimpinan yang berlandaskan etika dan kemaslahatan publik akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kelima, penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan tata kelola (*governance resilience*) dapat diperkuat melalui integrasi nilai-nilai etika, kapasitas transformasional, dan orientasi pelayanan publik. Dalam menghadapi tantangan seperti transformasi digital, perubahan sosial, krisis ekonomi, maupun bencana, pemerintah daerah membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga legitimasi publik sekaligus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berintegritas menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi birokrasi modern.

Secara keseluruhan, kerangka *Islamic Ethical Public Leadership* memberikan kontribusi praktis sebagai acuan bagi pemerintah daerah, lembaga pengembangan kepemimpinan, serta pembuat kebijakan dalam merancang strategi reformasi tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Implementasi model ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dalam jangka panjang.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil dan kontribusinya. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual kualitatif yang bertumpu pada kajian literatur dan sintesis teoritis. Oleh karena itu, model *Islamic Ethical Public Leadership* (IEPL) yang dikembangkan dalam penelitian ini belum diuji secara empiris pada institusi pemerintahan daerah maupun organisasi sektor publik lainnya. Meskipun penelitian konseptual memiliki peran penting dalam pengembangan teori, validasi empiris tetap diperlukan untuk menguji efektivitas dan relevansi model dalam praktik tata kelola pemerintahan. Kedua, penelitian ini berfokus pada integrasi Etika Kepemimpinan Publik, Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Pelayan, Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam, dan Tata Kelola Berkelanjutan dari perspektif teoritis. Akibatnya, penelitian belum sepenuhnya mampu menggambarkan keragaman konteks kelembagaan, budaya organisasi, dinamika politik, dan karakteristik pemerintahan daerah yang dapat memengaruhi implementasi

kepemimpinan publik berbasis etika. Perbedaan lingkungan kelembagaan dan budaya birokrasi berpotensi menghasilkan variasi dalam penerapan model yang diusulkan. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam pengaruh faktor-faktor eksternal seperti budaya birokrasi, kepemimpinan politik, kapasitas kelembagaan, transformasi digital, tingkat partisipasi masyarakat, maupun kondisi sosial ekonomi daerah. Padahal faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi hubungan antara kepemimpinan etis dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian mendatang perlu memasukkan variabel-variabel kontekstual tersebut agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kepemimpinan publik dalam berbagai lingkungan pemerintahan.

Keempat, penelitian ini belum mengembangkan indikator operasional dan instrumen pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat implementasi *Islamic Ethical Public Leadership* secara empiris. Meskipun penelitian telah mengidentifikasi dimensi-dimensi utama model, pengembangan instrumen yang valid dan reliabel masih diperlukan agar konsep ini dapat diuji secara kuantitatif maupun digunakan sebagai alat evaluasi kepemimpinan di sektor publik.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa agenda penelitian yang dapat dilakukan pada masa mendatang. Pertama, penelitian selanjutnya perlu melakukan pengujian empiris terhadap model *Islamic Ethical Public Leadership* melalui pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun metode campuran (*mixed methods*). Pengujian empiris diperlukan untuk mengetahui sejauh mana model ini berpengaruh terhadap integritas tata kelola, kepercayaan publik, ketahanan kelembagaan, dan keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan.

Kedua, penelitian mendatang perlu mengembangkan dan memvalidasi instrumen pengukuran *Islamic Ethical Public Leadership*. Pengembangan indikator yang terstandar akan memudahkan proses pengukuran, evaluasi, dan perbandingan implementasi model pada berbagai institusi pemerintahan. Ketiga, studi komparatif antar daerah, antar institusi, maupun antar negara sangat penting dilakukan untuk memahami bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Islam berinteraksi dengan berbagai konteks tata kelola yang berbeda. Penelitian komparatif tersebut akan memperkaya pemahaman mengenai relevansi dan adaptabilitas model dalam berbagai lingkungan administrasi publik.

Keempat, penelitian selanjutnya dapat mengkaji hubungan antara *Islamic Ethical Public Leadership* dengan isu-isu tata kelola kontemporer seperti transformasi

digital pemerintahan (*digital governance*), pemerintahan cerdas (*smart governance*), kecerdasan buatan dalam administrasi publik (*artificial intelligence in public administration*), tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), pencegahan korupsi, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Kelima, khusus dalam konteks Indonesia, penelitian lanjutan dapat menguji implementasi model ini pada pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan yang berbeda. Pendekatan tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan kepemimpinan publik berbasis etika Islam dalam praktik pemerintahan.

Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, penelitian ini memberikan landasan teoritis awal bagi pengembangan konsep *Islamic Ethical Public Leadership* sebagai model kepemimpinan publik yang mengintegrasikan etika, nilai-nilai Islam, transformasi organisasi, dan orientasi pelayanan publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Diharapkan penelitian empiris pada masa mendatang dapat memperkuat, menyempurnakan, dan memperluas relevansi model ini dalam berbagai konteks tata kelola pemerintahan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengembangkan konsep *Islamic Ethical Public Leadership* (IEPL) sebagai kerangka kepemimpinan publik yang komprehensif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Model yang dikembangkan mengintegrasikan Etika Kepemimpinan Publik, Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Pelayan, dan Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam menjawab berbagai tantangan tata kelola pemerintahan kontemporer. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh efektivitas administrasi dan kinerja organisasi, tetapi juga oleh kualitas etika kepemimpinan yang mendasari proses pengambilan keputusan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islam, khususnya *al-amānah* (amanah), *al-'adl* (keadilan), *al-ṣidq* (kejujuran), *shūrā* (musyawarah), dan *maslahah* (kemaslahatan publik), memberikan landasan normatif yang kuat dalam membangun kepemimpinan publik yang berintegritas. Nilai-nilai tersebut memperkuat prinsip-prinsip tata kelola modern seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tanggung jawab publik, sehingga mampu meningkatkan legitimasi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Pelayan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Kepemimpinan transformasional berperan dalam mendorong inovasi, perubahan organisasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan, sedangkan kepemimpinan pelayan memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan publik. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menghasilkan model kepemimpinan yang seimbang antara efektivitas organisasi dan penciptaan nilai publik.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model *Islamic Ethical Public Leadership* sebagai kerangka konseptual baru dalam kajian administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Berbeda dengan model kepemimpinan yang lebih menitikberatkan pada efektivitas organisasi, model ini menempatkan tata kelola etis sebagai fondasi utama kepemimpinan publik. Melalui integrasi tanggung jawab etis, kapasitas transformasional, orientasi pelayanan, dan nilai-nilai Islam, model ini menjelaskan bagaimana integritas tata kelola, kepercayaan publik, ketahanan kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan dapat diwujudkan secara simultan.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai etika kepemimpinan publik, administrasi publik Islam, dan tata kelola berkelanjutan melalui pengembangan model yang menghubungkan aspek moral, organisasi, dan tata kelola dalam satu kerangka yang terpadu. Dari perspektif praktis, model ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, lembaga pengembangan kepemimpinan, dan pembuat kebijakan dalam merancang program reformasi birokrasi, penguatan integritas aparatur, serta pembangunan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, *Islamic Ethical Public Leadership* tidak hanya menawarkan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga memberikan arah strategis bagi reformasi pemerintahan yang berorientasi pada nilai-nilai etika, kemaslahatan publik, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam menghadapi tantangan administrasi publik abad ke-21, model ini berpotensi menjadi salah satu pendekatan alternatif yang mampu memperkuat kualitas kepemimpinan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif, resilien, dan berkelanjutan.

Daftar pustaka

- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Psychology Press.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Deng, X., Zhang, Y., & Liu, H. (2023). Transformational leadership and organizational effectiveness in public sector organizations: A systematic review. *Public Organization Review*, 23(4), 567–584.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Greenleaf, R. K. (1977). *Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness*. Paulist Press.
- Haq, M. A. (2022). Islamic leadership and public welfare: The role of *maslahah* in governance practices. *Journal of Islamic Governance Studies*, 8(2), 45–61.
- Jahidi, I., & Hafid, A. (2017). Transformational leadership and servant leadership in contemporary governance. *International Journal of Public Leadership*, 13(3), 145–158.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Monica, R., & Partina, S. (2024). Servant leadership and employee engagement in public organizations. *Public Administration and Policy Review*, 15(1), 67–82.
- Nurhayati, N., Rahman, A., & Yusuf, M. (2024). Transformational leadership and collaborative governance in public service delivery. *Journal of Public Sector Innovation*, 12(2), 88–103.
- Rizal, M. (2019). Servant leadership from an Islamic perspective: Ethical foundations for public service. *International Journal of Islamic Management Studies*, 5(1), 21–36.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.